

ABSTRAK

Muhammad Jikri. (2022). *Eksistensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Di Kota Ternate Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen* (dibimbing oleh Mardia Ibrahim dan Sultan Alwan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di Kota Ternate sebagai upaya perlindungan konsumen dan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di Kota Ternate

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah untuk mengkaji tentang keadaan hukum atau fakta yang didapat dalam kehidupan masyarakat. Ipe penelitian ini sering disebut sebagai *Socio Legal Research*. Pada penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pembentukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) di Kota Ternate didasarkan pada alasan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tujuan pembentukannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen karena tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat,

Faktor-faktor yang menjadi kendala belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di Kota Ternate ialah dapat ditinjau dari 1) aspek substansi Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 2) Hanya dapat Melalui Otoritas Lembaga Pemerintah Pembentuk LPKSM. Melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan N0: 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001, telah dikeluarkan sebuah acuan hukum tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM dalam keputusan tersebut, adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan perlindungan konsumen. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang mempunyai persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Pembentukan LPKSM, Kota Ternate.*

ABSTRACT

Muhammad Jikri. (2022). *The Existence of the Establishment of a Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM) in Ternate City as an Effort for Consumer Protection (supervised by Mardia Ibrahim and Sultan Alwan)*

This study aims to determine the existence of the establishment of the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM) in Ternate City as an effort to protect consumers and what factors are the obstacles that have not been established by the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM) in Ternate City.

The type of research used in this research is empirical legal research. Empirical legal research is to study the legal situation or facts obtained in people's lives. This type of research is often referred to as Socio Legal Research. In empirical legal research, what is initially studied is secondary data which is then followed by research on primary data in the field.

The results of this study indicate that the urgency of establishing a non-governmental consumer protection institution (LPKSM) in Ternate City is based on the reason that the Non-Governmental Organization for Consumer Protection aims to increase community participation in consumer protection efforts because the responsibility to protect consumer rights is the government's obligation and society,

Factors constraining the not yet formed Community Self-Help Protection Agency (LPKSM) in the City of Ternate can be seen from 1) the substance aspect of Government Regulation Number 59 of 2001 concerning Self-Help Consumer Protection Institutions. 2) Only through the Authority of the Government Institution Forming LPKSM. Through the Decree of the Minister of Industry and Trade No: 302/MPP/Kep/10/2001 dated 24 October 2001, a legal reference was issued regarding the Registration of Non-Governmental Consumer Protection Institutions as implementation of Article 2 and Article 10 of Government Regulation Number 59 of 2001 concerning Protection Institutions Non-Governmental Consumers (LPKSM). LPKSM in the decree, is a Non-Governmental Institution registered and recognized by the Government which has consumer protection activities. Registration Certificate of the Consumer Protection Agency (TDLPK) is a Registration Certificate given by the Government to LPKSMs that have the requirements to operate in the field of implementing consumer protection.

Keywords: Formation of LPKSM, City of Ternate.